

Fatwa Ulama dan Diskriminasi Perempuan pada Ranah Pendidikan

Faiq Ainurrofiq

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
ainurrofiq@iainponorogo.ac.id

Abstract: *This article examines the discrimination of women in the education sector perpetuated through the ulama fatwa. The data were taken from the fatwas of Salafi ulama that discussed women's education, both collectively and individually. The structure of the fatwa text is then analyzed using critical discourse analysis at the macro, meso, and microstructural levels. The researcher concludes that Saudi Arabian Salafi scholars use fatwa to practice discriminating against women in education. In this context, the ulama decided (1) differences in the curriculum in girls' schools and boys' schools; (2) instructing women to take specific majors that are deemed appropriate to their nature; (3) prioritizing marriage for women over continuing their studies; (4) enough for women to receive education at the basic education level. The relation between the anti-equality ideology and patriarchal Arab culture influences the construction of ulama fatwas which tend to be discriminatory in women's education. Saudi Arabian Salafi clerics can freely produce and reproduce discriminatory discourse in women's education because Salafi clerics have the power to organize the domain of education in Saudi Arabia, especially before the beginning of the new Saudi Arabia era under the leadership of Muhammad bin Salman.*

Keywords: *Women's Education, Discrimination, Religious Teachings, Ideology, Power.*

Abstrak: artikel ini mengkaji diskriminasi peran perempuan pada ranah pendidikan yang dilanggengkan melalui fatwa ulama. Data penelitian diambil dari fatwa-fatwa ulama Salafi Arab Saudi yang membahas pendidikan perempuan baik yang difatwakan secara kolektif maupun individu. Struktur teks fatwa tersebut kemudian dianalisa menggunakan analisis wacana kritis pada tataran struktur makro, meso, maupun mikro. Peneliti menyimpulkan bahwa para ulama Salafi Arab Saudi menggunakan teks fatwa sebagai sarana untuk melakukan praktik diskriminasi perempuan pada ranah pendidikan. Dalam konteks ini ulama menfatwakan (1) pembedaan kurikulum pada sekolah perempuan dengan sekolah laki-laki; (2) penggiringan perempuan untuk mengambil jurusan tertentu yang dianggap sesuai dengan kodratnya; (3) pengutamaan menikah bagi perempuan daripada melanjutkan studi; (4) cukup bagi perempuan mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Relasi ideologi ulama yang anti kesetaraan dan budaya Arab yang patriarki mempengaruhi konstruksi fatwa ulama yang cenderung diskriminatif pada ranah pendidikan perempuan. Para ulama Salafi Arab Saudi dapat leluasa memproduksi dan mereproduksi wacana diskriminatif dalam bidang pendidikan perempuan karena Ulama Salafi memiliki kekuasaan untuk menata ranah pendidikan di Arab Saudi, khususnya sebelum datangnya era Arab Saudi baru di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman.

Kata kunci: Pendidikan Perempuan, Diskriminasi, Fatwa Ulama, Ideologi, Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Di negara Islam Arab Saudi, fatwa ulama memiliki peranan penting dalam mengatur ranah pendidikan. Fatwa ulama sering kali dijadikan landasan konstitusi hukum negara dan diterapkan secara resmi untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹ Hal ini tidak lepas dari konstruksi konstitusi hukum dan peradilan Arab Saudi yang bertumpu pada prinsip syari'at islam yang digali oleh ulama dari al-Qur'an dan Sunnah.² Syari'at islam di negara tersebut dianggap sebagai sistem lengkap yang dapat digunakan untuk mengatur urusan publik termasuk urusan pendidikan.³

Penegakan fatwa di tengah-tengah masyarakat dilakukan oleh polisi syariah yang beroperasi di bawah Komite Penegak Kebenaran dan Larangan Melakukan Kejahatan (*Hay'at li al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar*).⁴ Polisi Syari'ah tidak hanya menindak pelanggar aturan pemerintah, namun mereka juga mengawal penerapan fatwa yang ditetapkan oleh ulama untuk mengatur perilaku masyarakat.⁵ Dengan demikian, fatwa ulama dapat mengontrol kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.

Dalam tulisan ini, teks fatwa ulama diposisikan sebagai tindakan sosial yang tidak bebas konteks. Fatwa ulama sebagai tindakan sosial dapat digunakan sebagai medium oleh ulama untuk mempersuasi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan.⁶ Dengan kata lain, melalui penggunaan bahasa yang terdapat dalam fatwa, ulama dapat mengarahkan dan membentuk identitas masyarakat dan mengontrol tindakannya.⁷ Jika demikian, wacana fatwa

¹ Al-Atawneh, "Is Arab Saudi a Theocracy?," 730. Khaled M. Abou El Fadl, "Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj," R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004, 252.

² Roula Baki, "Gender-Segregated Education in Arab Saudi: Its Impact on Social Norms and the Saudi Labor Market," *Education Policy Analysis Archives* 12, no. 28 (June 17, 2004): 1, <https://eric.ed.gov/?id=EJ852310>. Muhammad Al-Atawneh, "Is Arab Saudi a Theocracy? Religion and Governance in Contemporary Arab Saudi," *Middle Eastern Studies* 45, no. 5 (September 1, 2009): 721, <https://doi.org/10.1080/00263200802586105>. Syari'ah adalah kehendak tuhan dalam bentuk yang abstrak dan ideal, sedangkan fiqh adalah hasil dari upaya manusia dalam memahami kehendak tuhan. El Fadl, "Atas Nama Tuhan," 61.

³ Al-Atawneh, "Is Arab Saudi a Theocracy?," 724–25.

⁴ Alexander Bligh, "The Saudi Religious Elite (ULAMA) as Participant in The Political System of The Kingdom," *International Journal of Middle East Studies* 17, no. 1 (Februari 1985): 42, <https://doi.org/10.1017/S0020743800028750>.

⁵ Mariwan Kanie, "Young Saudi Women Novelists: Protesting Clericalism, Religious Fanaticism and Patriarchal Gender Order," *Journal of Arabian Studies* 7, no. 2 (3 Juli 2017): 288, <https://doi.org/10.1080/21534764.2017.1499227>.

⁶ Nora Alarifi Pharaon, "Saudi women and the Muslim state in the twenty-first century," *Sex roles* 51, no. 5–6 (2004): 361.

⁷ Linda McLoughlin, *A Critical Discourse Analysis of South Asian Women's Magazines: Undercover Beauty*, Palgrave Studies in Language, Gender and Sexuality (London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017), 4. Ruth Wodak, Paul A. Chilton, dan Wodak-Chilton, ed., *A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology, and Interdisciplinary*, Discourse Approaches to Politics, Society, and Culture

dapat dijadikan sebagai praktik dominasi kekuasaan elit dan institusi tertentu yang dapat menyebabkan munculnya kesenjangan sosial (*social inequality*) termasuk di dalamnya diskriminasi gender (*gender inequality*).⁸

Ada banyak kajian terdahulu yang membahas fatwa dan peran perempuan sebagai obyek kajiannya seperti penelitian yang membahas fatwa sebagai tindakan sosial yang dapat mempengaruhi dan mengontrol perilaku masyarakat.⁹ Fatwa ulama juga efektif membantu keberhasilan program pemerintah.¹⁰ Fatwa ulama juga turut mensukseskan program penggunaan alat kontrasepsi di Sudan Selatan.¹¹ Dari penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki otoritas keagamaan yang dijadikan rujukan masyarakat.¹²

Sementara penelitian terdahulu terkait peran perempuan di Saudi Arabia seperti penelitian yang dilakukan oleh Pharaon (2004) yang memotret dilema sulitnya meningkatkan peran perempuan Saudi Arabia karena batasan-batasan yang ia sebut dengan *Arab islamic heritage* (warisan Arab Islam).¹³ Hambatan organisasi, personal, dan budaya juga menghambat peran perempuan Arab Saudi dalam memaksimalkan perannya dalam bidang kepemimpinan.¹⁴ Budaya tradisional yang terpadu dengan praktik keagamaan yang konservatif memunculkan diskriminasi yang menghambat peran perempuan dalam wilayah kepemimpinan.¹⁵ Al-Kayed (2015) juga meneliti hambatan yang dihadapi perempuan yang menjadi pemimpin di beberapa universitas karena kurangnya otoritas perempuan.¹⁶ Penelitian J. Hodges (2017) juga mengkaji rendahnya partisipasi publik perempuan Saudi yang

13 (Amsterdam: Benjamins, 2005), 23. Teun A. Van Dijk, "Discourse and manipulation," *Discourse & Society* 17, no. 3 (2006): 363.

⁸ Teun A. Van Dijk, "Principles of Critical Discourse Analysis," *Discourse & Society* 4, no. 2 (April 1993): 5, <https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>.

⁹ Yvette Talhamy, "The Fatwas and the Nusayri/Alawis of Syria," *Middle Eastern Studies* 46, no. 2 (1 Maret 2010): 175–94, <https://doi.org/10.1080/00263200902940251>.

¹⁰ Ghada N. Radwan dkk., "Impact of religious rulings (Fatwa) on smoking," *Journal-Egyptian Society of Parasitology* 33, no. 3; SUPP (2003): 1087–1102.

¹¹ Shuji Sueyoshi dan Ryutaro Ohtsuka, "Significant effects of Fatwa-based perception on contraceptive practice among Muslim women in south Jordan under the early stage of fertility transition," *Biodemography and social biology* 56, no. 1 (2010): 67–79.

¹² Nico J. G. Kaptein, "The Voice of the 'Ulamâ': Fatwas and Religious Authority in Indonesia," *Archives de sciences sociales des religions* 115–130 (2004), <https://doi.org/10.4000/assr.1038>.

¹³ Pharaon, "Saudi women and the Muslim state in the twenty-first century."

¹⁴ Hanan Al-Ahmadi, "Challenges facing women leaders in Saudi Arabia," *Human Resource Development International* 14, no. 2 (1 April 2011): 149–66, <https://doi.org/10.1080/13678868.2011.558311>.

¹⁵ Manal Matouq Kattan dkk., "Factors of Successful Women Leadership in Saudi Arabia," *Asian Social Science* 12, no. 5 (19 April 2016): 94, <https://doi.org/10.5539/ass.v12n5p94>.

¹⁶ Lama Al-Kayed, "Leadership challenges for women managers in public universities in Saudi Arabia," *Global Journal of Human-Social Science Research* 15, no. 4 (2015).

menempati posisi paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.¹⁷

Adapun tulisan ini hendak mengungkap domestifikasi peran perempuan dalam ranah pendidikan yang dilanggengkan melalui fatwa-fatwa para ulama Salafi terdahulu dengan menggunakan paradigma kritis. Dengan demikian tulisan ini menjawab bagaimana ulama Salafi Arab Saudi dan lembaganya turut berperan mendiskriminasi peran perempuan melalui fatwa-fatwanya baik yang dilakukan secara kolektif maupun individu. Tulisan ini juga akan mengungkap relasi ideologi dan budaya yang melatari produksi fatwa yang diskriminatif terhadap perempuan dalam bidang pendidikan.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kritis. Pendekatan kritis menurut van Dijk dapat digunakan untuk mengungkap adanya ketimpangan (*inequalities*) dalam praktik sosial yang ada di masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini mempermudah peneliti untuk menggali pesan teks yang tersembunyi di balik yang tampak (*virtual reality*) dalam fatwa ulama.¹⁹ Pendekatan kritis membekali peneliti untuk menggali proses produksi wacana dan dampaknya pada praktik sosial masyarakat.²⁰ Melalui teks wacana yang diproduksi, peneliti juga dapat mengetahui dan mengungkap dominasi aktor dan institusi tertentu yang menimbulkan kesenjangan sosial bagi perempuan Saudi khususnya pada ranah pendidikan.²¹ Dengan kata lain, dari teks fatwa peneliti dapat melacak representasi ideologi dan kekuasaan yang membentuk dan dibentuk oleh konstruksi sosial tertentu.²²

Data dalam penelitian analisis wacana kritis dapat berupa tulisan (teks) yang digunakan dalam praktik sosial.²³ Pada penelitian ini data yang digunakan berupa pemakaian teks sebagai sebuah wacana yang digunakan dalam praktik sosial. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data berupa teks-teks fatwa yang terdapat dalam kitab-kitab ulama Saudi. Antara lain kitab:

¹⁷ Julie Hodges, "Cracking the Walls of Leadership: Women in Saudi Arabia," *Gender in Management: An International Journal* 32, no. 1 (6 Maret 2017): 34–46, <https://doi.org/10.1108/GM-11-2015-0106>.

¹⁸ Teun A. Van Dijk, "Aims of critical discourse analysis," *Japanese discourse* 1, no. 1 (1995): 17.

¹⁹ Aris Badara, *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media* (Prenada Media, 2014), 64.

²⁰ McLoughlin, *A Critical Discourse Analysis of South Asian Women's Magazines*, 24.

²¹ Van Dijk, "Principles of Critical Discourse Analysis," 249–50. Van Dijk, "Aims of critical discourse analysis," 19.

²² David Manchin dan Andrea Mayr, *How to do critical discourse analysis* (New York: Sage Publications, 2012), 5.

²³ Norman Fairclough, "Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities," *Discourse & society* 4, no. 2 (1993): 134.

Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah Jilid 1 dan 2 (1995), karya ulama-ulama Saudi; *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'* (2003) karya ulama-ulama Saudi yang dikumpulkan oleh Ahmad 'Abd al-Raziq ad-Darwisy; *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (2004) karya 'Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz; dan *Fatawa Nurun ala ad-Darb* Jilid 21, 30, dan 31 (2016) karya 'Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz. Kitab-kitab ini dipilih karena dinilai representatif dalam menjelaskan peran perempuan di ruang publik. Penulis kitab-kitab tersebut merupakan ulama-ulama Arab Saudi otoritatif yang berhak mengeluarkan fatwa. Selain itu peneliti juga mengambil data fatwa-fatwa ulama Saudi melalui internet guna memperkuat dan memperkaya data. Wacana fatwa dalam bentuk teks pada kitab-kitab tersebut kemudian dipilih dan didokumentasikan berdasarkan tema yang sesuai dengan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Representasi Perempuan dalam Fatwa Ulama Salafi

Sebelum masuk pada pembahasan bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada wacana fatwa dalam ranah pendidikan, terlebih dahulu penulis memaparkan bagaimana ulama Salafi Saudi Arabia menggambarkan sosok perempuan secara umum dalam fatwa-fatwanya. Pembahasan ini menjadi penting guna melacak gagasan inti munculnya wacana diskriminatif terhadap sosok perempuan hingga pada akhirnya diskriminasi tersebut merambat dan meluas pada bidang-bidang yang lain termasuk pada bidang pendidikan perempuan.

Dalam membahas peran perempuan, para ulama Salafi Arab Saudi secara umum berpendapat bahwa Islam adalah agama yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Perempuan dalam Islam menempati posisi yang mulia. Para ulama seringkali membandingkan posisi perempuan dalam Islam dengan posisi perempuan pada tradisi tertentu seperti tradisi Yunani dan Romawi. Para ulama berpendapat bahwa posisi perempuan dalam Islam jauh lebih mulia dibandingkan dengan posisi perempuan dalam tradisi Yunani dan Romawi.²⁴ Ulama juga membandingkan posisi perempuan dalam Islam dan posisi perempuan pada masa Arab Jahili, perempuan dalam tradisi agama Yahudi, Nasrani dan

²⁴ Yusuf Sidani, "Women, work, and Islam in Arab societies," *Women in Management Review* 20, no. 7 (2005): 502.

agama-agama lainnya. Menurut ulama posisi perempuan dalam islam jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan posisi perempuan pada masa-masa tradisi tersebut.²⁵

Ulama senior Abdul Azis bin Abdillah bin Baz menyatakan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam hal berdakwah.²⁶ Perempuan dalam islam sungguh tinggi derajatnya, perempuan selalu diagungkan karena laki-laki harus berkhidmah kepadanya.²⁷ Perempuan juga merupakan madrasah pertama yang menentukan keberhasilan generasi-generasi selanjutnya. Ulama lainnya, Muhammad al-Shalih al-'Utsaimin, salah satu anggota Dewan Ulama' Sunior Arab Saudi menyatakan bahwa perempuan adalah saudara kandung bagi laki-laki. Menurutnya perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan.²⁸ Hal senada juga difatwakan oleh Muhammad Ibrahim Alu al-Syaikh yang menfatwakan tidak adanya batasan bagi perempuan dalam belajar selagi bermanfaat baginya.²⁹

Meski demikian, pada satu sisi para ulama Salafi Arab Saudi sepakat betapa mulianya posisi perempuan dalam islam, ulama juga menganggap perempuan sebagai saudara kandung (*syaqāiq*) laki-laki dan sebagian perannya setara dengan laki-laki. Namun di sisi lain, para ulama sering kali menggambarkan sosok perempuan dan perannya secara diskriminatif. Penggambaran diskriminatif pada perempuan disebut dengan misrepresentasi.³⁰ Misrepresentasi terhadap perempuan dalam wacana fatwa pada satu sisi merugikan, meminggirkan, dan melemahkan peran perempuan sebagai bagian dari kelompok sosial, dan di sisi lain secara tidak langsung mengistimewakan dan mengunggulkan peran laki-laki.³¹

Meskipun para ulama Salafi Arab Saudi pada satu sisi sepakat bahwa islam memuliakan perempuan, namun di sisi lain hampir semua Ulama menyepakati bahwa peran perempuan yang paling cocok adalah di rumah. Kesepakatan tersebut telah ditetapkan dalam berbagai fatwa ulama, baik melalui lembaga fatwa resmi negara maupun secara individu. Dalam fatwa-fatwa yang membahas isu ini para ulama mengacu pada ayat al-Qur'an Surat al-

²⁵ 'Abdul Azīz bin Abdillāh Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, vol. 27 (Riyād: al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta', 2013), 105.

²⁶ 'Abdul Azīz bin Abdillāh Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, vol. 4 (Riyād: Ri'asah Idārati al-Buhuts al-'Ilmiyyah, 1999), 240.

²⁷ 'Abdul Azīz bin Abdillāh Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, vol. 30, 1 (Riyad: al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta', 2016), 9–10.

²⁸ Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, vol. 2 (Riyad: Maktabah Dār Tayariyah, 1995), 571.

²⁹ Jam'un Min al-'Ulamā', 2:942–43.

³⁰ Eriyanto, *Analisis wacana: pengantar analisis teks media* (LKIS Yogyakarta, 2001), 121–22.

³¹ Michelle M. Lazar, ed., *Feminist Critical Discourse Analysis* (London: Palgrave Macmillan UK, 2005), 5, <https://doi.org/10.1057/9780230599901>.

Ahزاب: 23. Para ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah. Menurut ulama' Saudi, perintah itu berlaku umum kepada semua perempuan muslim, bukan hanya tertentu pada isteri-isteri Nabi Muhammad.³²

Terkait hal ini, lembaga fatwa resmi negara memfatwakan bahwa perempuan muslim yang beriman kepada Allah dan rasulnya disyariatkan untuk tinggal di rumah. Perempuan diperbolehkan keluar dari rumahnya ketika ada keperluan tertentu dengan syarat menutup aurat, tidak berdandan, dan tanpa menggunakan wewangian. Fatwa ini ditetapkan oleh 'Abdullah bin Baz sebagai Ketua lembaga fatwa, 'Abdul 'Aziz Alu al-Syaikh sebagai wakil, dan ketiga anggotanya adalah 'Abdullah bin Ghodyan, Shalih Fauzan, dan Bakr Abu Zaid.

Fatwa-fatwa serupa yang menyatakan bahwa peran utama perempuan adalah di rumah juga dikeluarkan oleh para ulama Salafi Arab Saudi lainnya secara individu, seperti 'Abdullah bin Baz yang memerintahkan perempuan agar selalu tinggal di rumah supaya terhindar dari kejahatan dan fitnah.³³ Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh juga memfatwakan hal yang sama, Alu al-Syaikh juga mengutip Surat al-Ahزاب: 23 dalam mendukung argumentasi fatwanya.³⁴ Ulama lainnya, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, yang merupakan anggota Dewan Ulama Senior yang berpengaruh³⁵ juga memfatwakan agar perempuan senantiasa tinggal di rumah agar terjaga dari fitnah.³⁶

Dari uraian tersebut tampak bahwa para ulama Salafi mengarahkan peran perempuan pada ranah domestik. Oleh karena itu, tempat yang paling cocok bagi perempuan menurut ulama adalah di rumah. Sebaliknya, secara tidak langsung ulama menetapkan bahwa tempat yang paling cocok bagi laki-laki adalah di ruang publik. Dengan demikian, ada dikotomi yang jelas antara peran perempuan dan laki-laki menurut para ulama Salafi Arab Saudi, perempuan di asosiasikan cukup berperan di dalam ruangan (*indoors*) dan laki-laki di asosiasikan sebagai sosok yang berperan penuh di luar ruangan (*outdoors*). Diskriminasi perempuan dalam fatwa ini muncul salah satunya karena adanya pandangan negatif para ulama Salafi terhadap perempuan. Beberapa cap buruk (*labelisasi*) pada perempuan ditemukan dalam argumentasi para ulama guna mendukung fatwa tersebut, di antaranya

³² Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:564.

³³ Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2016, 30:9–11. 'Abdul Azīz bin Abdillāh Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, vol. 31, 2 (Riyād: al-Ri'āsah al-'Āmmah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 2016), 45–48.

³⁴ Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:564.

³⁵ Eleanor Abdella Doumato, "Women and Work in Saudi Arabia: How Flexible Are Islamic Margins?," *Middle East Journal* 53, no. 4 (1999): 39.

³⁶ Muhammad al-Shālih al-'Utsaimīn, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, vol. 11 (Mamlakah 'Arabiyyah as-Su'udiyah: Mu'assasatu al-Syaikh Muhammad bin Shālih al-'Utsaimīn, 2003), 265.

seperti: perempuan sebagai sumber fitnah, kemungkarannya, dan keburukannya, sehingga sebaiknya perempuan tetap tinggal di rumah.³⁷

Dari pemaparan-pemaparan tentang gambaran umum representasi perempuan dalam fatwa ulama Arab Saudi tampak bahwa pada satu sisi para ulama dalam beberapa fatwanya menempatkan perempuan sebagai sosok yang mulia. Meskipun demikian, di sisi lain tampak bahwa dalam fatwa-fatwa ulama Salafi lainnya -baik secara individu maupun melalui lembaga fatwa- memandang perempuan secara diskriminatif. Para ulama dalam fatwanya seringkali melabeli perempuan sebagai sumber fitnah dan keburukannya, penggoda dan pemancing syahwat laki-laki, sosok yang emosional, lemah, dan kurang akalnya. Dari sini tampak adanya kontadiksi (paradoks) antara pandangan ulama yang pada satu sisi menempatkan perempuan pada posisi yang mulia, namun pada sisi lainnya ulama yang sama melalui fatwa-fatwanya justru lebih menonjolkan dan menekankan pandangan-pandangan diskriminatif terhadap perempuan.

Fatwa-fatwa diskriminatif yang menggambarkan representasi perempuan di atas merupakan gagasan inti yang menunjukkan makna global terkait dengan bagaimana ulama merepresentasikan perempuan. Makna global yang menjadi konsep dominan dan sentral merupakan hal paling penting yang hendak disampaikan oleh aktor (ulama). Struktur wacana inti ini oleh Van Dijk disebut dengan struktur makro yang di dalamnya berisi gagasan inti.³⁸ Gagasan inti dalam fatwa yang mengarahkan perempuan hanya diperbolehkan berpartisipasi pada ranah domestik tentu akan didukung dengan gagasan-gagasan pendukung lain yang mengarah pada gagasan inti tersebut. Dengan demikian, gagasan inti memiliki gagasan pendukung yang terkait dengan peran perempuan pada ranah publik termasuk pada ranah pendidikan bagi perempuan. Oleh karena itu, selanjutnya peneliti melacak, memaparkan, dan menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi lain yang ada dalam fatwa ulama Salafi Arab Saudi terkait dengan pendidikan perempuan. Perlu diketahui bahwa ulama Salafi memiliki peran yang penting dalam menata ranah sosial, pendidikan, dan budaya termasuk di dalamnya pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan.³⁹ Hal ini karena Ulama Salafi berperan

³⁷ Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2016, 30:11.

³⁸ Eriyanto, *Analisis wacana*, 229.

³⁹ May Yamani, "From Fragility to Stability: A Survival Strategy for the Saudi Monarchy," *Contemporary Arab Affairs* 2, no. 1 (1 Januari 2009): 94, <https://doi.org/10.1080/17550910802576114>. Marwan Kraidy, "Reality Television, Gender, and Authenticity in Saudi Arabia," *Journal of Communication* 59, no. 2 (Juni 2009): 346, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2009.01419.x>.

sebagai penjaga (*guardian*) moral masyarakat.⁴⁰ Mereka menyediakan aturan-aturan moral dan berusaha menerapkannya secara publik bagi masyarakat Arab Saudi.⁴¹

Diskriminasi Peran Perempuan pada Ranah Pendidikan

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa para ulama Salafi Arab Saudi secara umum memandang perempuan dengan pandangan diskriminatif. Perempuan digambarkan dalam fatwa sebagai sumber fitnah dan keburukan, penggoda dan pemancing syahwat laki-laki, emosional dan lemah, kurang akalnyanya, mayoritas penghuni neraka, disamakan dengan binatang, dan diasosiasikan sebagai sosok yang tidak bisa mandiri. Kesemua gambaran tersebut mengarah pada gagasan inti yang menetapkan bahwa tempat perempuan yang paling sesuai menurut fatwa ulama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga. Peran perempuan diposisikan pada ranah domestik.

Wacana inti yang mendiskriminasi perempuan dalam fatwa tersebut kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan lain terkait dengan peran perempuan Arab Saudi termasuk dalam ranah pendidikan. Tidak jarang para perempuan masih mengalami diskriminasi dalam mengembangkan sumber dayanya dalam bidang pendidikan. Padahal pendidikan merupakan salah satu pintu pembuka yang dapat mengantarkan kesuksesan perempuan dalam berkarir.⁴²

Pada satu sisi sebenarnya ulama dalam beberapa fatwanya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk studi lebih lanjut sebagaimana halnya laki-laki.⁴³ Muhammad Ibrahim Alu al-Syaikh juga menfatwakan tidak adanya batasan bagi perempuan untuk belajar selagi perempuan dapat memperoleh manfaat dari studinya tersebut.⁴⁴ Namun dalam fatwa-fatwa yang lain, peneliti menemukan adanya indikasi diskriminasi yang menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam ranah pendidikan. Oleh sebab itu, perempuan sering kali menghadapi hambatan-hambatan yang membatasi karir pendidikannya.⁴⁵ Berikut beberapa fatwa diskriminatif yang menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dalam ranah pendidikan.

⁴⁰ Al-Atawneh, "Is Arab Saudi a Theocracy?," 721.

⁴¹ Otterbeck, "Salafi Ideology of Social Control versus a New Publicness in Arab Saudi," 342.

⁴² Kattan dkk., "Factors of Successful Women Leadership in Saudi Arabia," 95.

⁴³ Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:571–72.

⁴⁴ Jam'un Min al-'Ulamā', 2:942–43.

⁴⁵ Annemarie van Geel, "Separate or Together? Women-Only Public Spaces and Participation of Saudi Women in the Public Domain in Saudi Arabia," *Contemporary Islam* 10, no. 3 (September 2016): 363, <https://doi.org/10.1007/s11562-015-0350-2>.

Fatwa-fatwa larangan bercampur (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berdampak pada pemisahan ruang publik bagi laki-laki dan perempuan termasuk di lembaga-lembaga pendidikan. Pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan diterapkan secara ketat.⁴⁶ Sekolah perempuan dibedakan dengan sekolah laki-laki. Perbedaan antara sekolah perempuan dan laki-laki juga tercermin dalam pemisahan kepengurusan lembaga pendidikan perempuan dan laki-laki. Sekolah laki-laki langsung berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Arab Saudi sementara Sekolah perempuan sejak tahun 1960 sampai tahun 2002 berada di bawah naungan Department Of Religious Guidance. Perbedaan tersebut mengimplikasikan perbedaan dalam mempersiapkan masa depan karir perempuan dan laki-laki. Perempuan sengaja dididik dan dipersiapkan sebagai sosok ibu dan isteri yang baik dan dipersiapkan sebagai pekerja yang ditempatkan pada sektor yang sesuai dengan karakter dan tabiatnya yaitu pada sektor pendidikan dan keperawatan.⁴⁷

Menurut ulama, perempuan hanya boleh bersekolah di sekolah khusus perempuan begitu juga laki-laki. Berdasarkan pada ketetapan tersebut, Muhammad Shalih al-'Utsaimin menfatwakan agar pemerintah di negara-negara muslim menyediakan sekolah yang terpisah bagi perempuan dan bagi laki-laki sehingga perempuan dan laki-laki tidak bercampur di satu sekolah.⁴⁸ Lembaga fatwa resmi negara CRLO secara tegas menfatwakan larangan bercampur antara laki-laki dan perempuan di sekolah-sekolah. Menurut ulama tindakan tersebut termasuk perbuatan yang sangat berdosa (*al-munkarāt al-'adzīmah*) dan sangat merusak (*al-mafāsīd al-kabīrah*). Oleh karena itu, wali bagi perempuan dilarang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bercampur.⁴⁹ *Ikhtilat* dalam pembelajaran merupakan dosa besar karena dapat menimbulkan fitnah, menebar kebatilan, dan merusak kehormatan. Dengan demikian *ikhtilat* dapat menyebabkan keburukan dan rusaknya akhlak.⁵⁰

⁴⁶ Amélie Le Renard, "'Only for Women:' Women, the State, and Reform in Saudi Arabia," *The Middle East Journal* 62, no. 4 (1 Oktober 2008): 614, <https://doi.org/10.3751/62.4.13>.

⁴⁷ Amani Hamdan, "Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements," *International Education Journal* 6, no. 1 (Maret 2005): 44.

⁴⁸ Muhammad al-Shālih al-'Utsaimīn, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, vol. 12 (Mamlakah 'Arabiyyah as-Su'udiyah: Mu'assasatu al-Syaikh Muhammad bin Shālih al-'Utsaimīn, 2003), 507.

⁴⁹ Ahmad 'Abd al-Razzāq ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, vol. 12 (Riyād: Dār al-Mu'ayyad, 2003), 107.

⁵⁰ ad-Darwīsy, 12:166.

Pembedaan dikotomis antara laki-laki dan perempuan di ranah pendidikan di Arab Saudi juga memunculkan pembagian dikotomis pada ranah kurikulum sekolah.⁵¹ Meskipun secara umum ulama menekankan pentingnya kurikulum keagamaan islam bagi seluruh siswa, namun ada pembedaan kurikulum antara sekolah perempuan dan sekolah laki-laki.⁵² Di sekolah-sekolah khusus perempuan ulama menfatwakan tambahan muatan kurikulum terkait dengan urusan domestik perempuan. Kurikulum ini ditujukan agar perempuan selalu bertindak sesuai syari'ah dan jauh dari segala fitnah dalam menjalankan urusan agama dan keluarganya.⁵³

Pada jenjang pendidikan dasar kurikulum sekolah perempuan lebih ditekankan pada pembelajaran bahasa Arab, ekonomi rumah tangga, merawat anak, dan pendidikan agama.⁵⁴ Pembedaan kurikulum khusus perempuan di sekolah didasarkan pada peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Kurikulum sekolah perempuan lebih mengarah pada penyiapan masa depan perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kurikulum khusus perempuan ini lebih menekankan materi-materi yang sesuai dengan fungsi sosial dan biologisnya sebagai perempuan pada masyarakat tradisonal. Muatan kurikulum khusus tersebut seperti materi menegemen rumah tangga, merawat anak, menjahit dan memasak.⁵⁵ Dengan kata lain, kurikulum pendidikan untuk sekolah-sekolah perempuan tidak diarahkankan secara khusus untuk mempersiapkan perempuan Arab Saudi menghadapi tantangan kehidupan profesional.⁵⁶ Kurikulum sekolah-sekolah di Arab Saudi, khususnya sekolah negeri sangat terpengaruh oleh para ulama Salafi.⁵⁷

Pembedaan muatan kurikulum tersebut secara tidak langsung mengarahkan peran perempuan tetap berkuat pada ranah domestik setelah mereka selesai menempuh jalur pendidikan tertentu. Semua muatan kurikulum tersebut dipersiapkan agar perempuan tetap menjadi ibu dan istri yang “baik” bagi suami dan anak-anaknya. Menurut ulama, peran domestik bagi perempuan sesuai dengan syari'at islam. Berdasarkan pada argumentasi tersebut fatwa ulama yang mendiskriminasi perempuan dalam ranah pendidikan ini seakan

⁵¹ Girija Vidyasagar dan David M. Rea, “Saudi Women Doctors: Gender and Careers within Wahhabic Islam and a ‘Westernised’ Work Culture,” *Women’s Studies International Forum* 27, no. 3 (Agustus 2004): 267, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2004.06.008>.

⁵² Vidyasagar dan Rea, 267.

⁵³ ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā’imah li al-Buhūts al-’Ilmiyyah wa al-Iftā’*, 2003, 12:235.

⁵⁴ Haifaa Jawad, *The rights of women in Islam: An authentic approach* (Springer, 1998), 27.

⁵⁵ Mona AlMunajjed, *Women in Saudi Arabia Today* (New York: St. Martin’s Press, 1997), 67.

⁵⁶ Mark C. Thompson, “Saudi Women Leaders: Challenges and Opportunities,” *Journal of Arabian Studies* 5, no. 1 (2 Januari 2015): 25, <https://doi.org/10.1080/21534764.2015.1050880>.

⁵⁷ Courtney Freer, “The Symbiosis of Sectarianism, Authoritarianism, and Rentierism in the Saudi State,” *Studies in Ethnicity and Nationalism* 19, no. 1 (April 2019): 95, <https://doi.org/10.1111/sena.12287>.

sudah dilegitimasi dengan syari'at. Padahal di sisi lain penggunaan argumentasi tersebut semakin membelenggu dan membatasi kebebasan perempuan untuk menentukan dan memilih peran yang lebih profesional setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Dengan demikian kurikulum pendidikan khusus perempuan tidak disiapkan untuk mengantarkan perempuan dalam menghadapi tantangan kehidupan profesional.

Menurut fatwa 'Abdul Azis bin Baz perempuan hendaknya memilih jurusan sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Oleh sebab itu, ada jurusan-jurusan tertentu yang sebaiknya diambil oleh perempuan, seperti jurusan pendidikan dan humaniora.⁵⁸ Perempuan sebaiknya tidak mengambil jurusan-jurusan yang diasosiasikan hanya cocok bagi laki-laki seperti jurusan teknik, jurnalisme, farmasi dan arsitektur.⁵⁹ Bahkan untuk menentukan jurusan, perempuan harus menyesuaikan dengan keinginan walinya.⁶⁰ Menurut bin Baz jurusan studi islam dan tata bahasa Arab juga merupakan jurusan yang cocok bagi perempuan, sedangkan jurusan kimia, teknik, arsitektur, astronomi, geografi dianggap tidak cocok bagi kodrat perempuan sebagaimana jurusan kedokteran perempuan dan kebidanan yang tidak cocok bagi laki-laki.⁶¹

Fatwa-fatwa ulama yang secara umum mendiskriminasi peran perempuan, berkorelasi dengan fatwa-fatwa lain yang menata dan mengatur kehidupan perempuan pada ranah lainnya. Ulama yang dimintai fatwa tentang mana yang lebih utama antara menikah dan melanjutkan studi menjawab dengan tegas bahwa menikah lebih utama daripada melanjutkan studi.⁶² Dalam fatwa yang lain 'Utsaimin menegaskan bahwa penolakan perempuan atau orang tuanya terhadap laki-laki yang melamarnya dengan alasan masih akan menyelesaikan atau melanjutkan studi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah nabi Muhammad. Dalam lanjutan fatwanya, 'Utsaimin bahkan menfatwakan cukup bagi perempuan hanya menyelesaikan jenjang pendidikan dasar saja untuk karir kependidikannya. Perempuan tidak perlu sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, yang terpenting bagi perempuan adalah bisa membaca al-Qur'an, tafsir, dan hadis.⁶³

⁵⁸ Rajaa Aquil, "Change and Muslim women," *International journal of humanities and social science* 1, no. 21 (2011): 26.

⁵⁹ Baki, "Gender-Segregated Education in Saudi Arabia," 5.

⁶⁰ Md. Muddassir Quamar, "Sociology of the Veil in Saudi Arabia: Dress Code, Individual Choices, and Questions on Women's Empowerment: Sociology of the Veil in Saudi Arabia," *Digest of Middle East Studies* 25, no. 2 (September 2016): 7, <https://doi.org/10.1111/dome.12085>.

⁶¹ 'Abdul Azīz bin Abdillāh Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, vol. 24 (Riyād: Ri'āṣah Idārati al-Buhūts al-'Ilmiyyah, 2004), 39–40.

⁶² Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:704.

⁶³ Jam'un Min al-'Ulamā', 2:704.

Fatwa-fatwa demikian ini secara tidak langsung menghambat perempuan Arab Saudi untuk mengembangkan sumber daya pada ranah pendidikan.⁶⁴ Fatwa-fatwa ulama tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan fatwa lain yang menetapkan bahwa tempat yang paling sesuai bagi perempuan adalah di rumah. Oleh karena perempuan cukup berada pada ranah domestik, perempuan menurut ulama tidak perlu menyempurnakan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Cukup bagi perempuan memiliki kemampuan dasar seperti membaca dan menulis dan kemudian menikah. Kemampuan dasar tersebut menurut ulama sudah cukup sebagai bekal bagi perempuan untuk menjadi ibu rumah tangga yang berperan mengasuh anak.⁶⁵ Dengan kata lain, percuma saja bagi perempuan menyempurnakan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena ke depannya perempuan cukup mendidik anak-anaknya di rumah dan berbakti pada suaminya.

Wacana ulama dalam fatwa tersebut menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk sekunder yang perannya diasosiasikan cukup sederhana sehingga tidak memerlukan sumber daya pendidikan yang tinggi. Hidup perempuan seakan telah selesai ketika mereka menikah dan mempunyai anak. Tampak jelas di sini perempuan dipinggirkan dari ruang publik dan digiring menuju ruang domestik. Sebaliknya laki-laki diberikan ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan akses pada pendidikan karena laki-laki dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab atas segalanya termasuk urusan rumah tangga. Tidak seperti perempuan, laki-laki diberi hak oleh ulama untuk menyempurnakan dan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Memetakan Struktur Makro, Meso, dan Mikro dalam Wacana Diskriminasi Perempuan dalam Fatwa Ulama

Kontrol kelompok dominan melalui wacana dapat dilihat dari pola dimensi teksnya.⁶⁶ Melalui teks fatwa yang diproduksi oleh ulama, peneliti dapat mengetahui dan mengungkap dominasi aktor dan institusi tertentu yang menyebabkan munculnya diskriminasi bagi perempuan Saudi.⁶⁷ Dengan kata lain, dari teks wacana fatwa peneliti dapat melacak representasi ideologi dan kekuasaan yang membentuk dan dibentuk oleh konstruksi sosial tertentu.⁶⁸ Dalam pembahasan ini, peneliti mencoba memetakan pola dimensi teks yang

⁶⁴ Hamdan, "Women and Education in Saudi Arabia," 47.

⁶⁵ Baki, "Gender-Segregated Education in Saudi Arabia," 3.

⁶⁶ Van Dijk, "Aims of critical discourse analysis," 21.

⁶⁷ Van Dijk, "Principles of Critical Discourse Analysis," 249–50. Van Dijk, "Aims of critical discourse analysis," 19.

⁶⁸ Manchin dan Mayr, *How to do critical discourse analysis*, 5.

mencerminkan dan menggambarkan adanya dominasi kelompok tertentu yang menimbulkan ketimpangan pada kelompok lain melalui fatwa ulama.

Pemetaan dimensi teks dapat dimulai dengan mencari tema umum dari suatu wacana. Topik atau tema inti ini menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting yang hendak disampaikan oleh aktor. Bagian ini disebut dengan struktur makro.⁶⁹ Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud teks adalah teks-teks fatwa yang telah dianalisis sebelumnya, sedangkan yang dimaksud sebagai aktor adalah para ulama yang menciptakan, menerbitkan, dan menyebarluaskan teks tersebut kepada khalayak guna mempersuasi, membentuk identitas, dan mengontrol perilaku masyarakat.

Melihat paparan analisis pada teks fatwa ulama pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa topik yang menjadi gagasan inti yang hendak disampaikan oleh ulama terkait dengan peran perempuan dalam bidang pendidikan adalah “diskriminasi pendidikan bagi perempuan”. Dalam sebagian besar teks fatwa yang diproduksi dan dipromosikan, ulama seringkali mewacanakan gagasan inti bahwa peran yang utama bagi perempuan adalah di rumah. Para ulama Salafi Arab Saudi, baik secara individu maupun melalui lembaga fatwa mendasarkan argumentasi gagasannya pada ayat al-Qur'an Surat al-Ahzab: 33 yang artinya: *dan tetaplah kalian semua para perempuan berada di rumah*. Fatwa-fatwa yang mendiskriminasi perempuan tersebut mengkonstruksi ketidakadilan dan subordinasi karena meminggirkan dan merugikan pihak perempuan khususnya dalam mengakses pendidikan.

Meskipun beberapa kali ulama mewacanakan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan melalui sebagian fatwanya, namun topik tersebut bukan merupakan gagasan inti yang mencerminkan visi ulama. Hal itu dibuktikan dengan sedikitnya fatwa-fatwa lain yang mendukung gagasan kesetaraan pendidikan. Faktanya, dalam fatwa-fatwa yang membahas peran perempuan di ranah publik ulama seringkali mewacanakan ketidakadilan. Peran publik perempuan seringkali dibatasi, disubordinasi, dan dimarginalkan. Gagasan inti yang mewacanakan diskriminasi terhadap perempuan dapat dibuktikan dengan banyaknya fatwa-fatwa pendukung yang mengarah pada gagasan tersebut. Dalam konteks analisis wacana kritis, gagasan pendukung yang mendukung gagasan inti disebut dengan super struktur ada pula yang menyebutnya dengan struktur meso.

Pada tataran super struktur atau struktur meso peneliti berusaha menemu kenali dan menganalisis fatwa dengan cara melacak alur yang mengarah pada kesatuan arti yang

⁶⁹ Eriyanto, *Analisis wacana*, 229.

ditampilkan dalam teks.⁷⁰ Dengan demikian, untuk menemukan super struktur, peneliti harus menemukan alur dalam teks-teks fatwa yang membentuk sebuah kesatuan arti yang mendukung topik utama dalam fatwa. Dari alur yang membentuk kesatuan arti tersebut peneliti dapat menemukan benang merah yang menyiratkan adanya hubungan antara topik utama dan super struktur. Benang merah tersebut juga mengisyaratkan adanya hubungan antara fatwa yang satu dengan fatwa lainnya, khususnya fatwa-fatwa yang terkait dengan peran perempuan pada ranah pendidikan.

Dari pelacakan melalui analisis fatwa ulama Salafi tentang peran perempuan yang telah dipaparkan sebelumnya, tampak bahwa fatwa-fatwa yang mengarah pada pelarangan dan pembatasan peran perempuan merupakan gagasan pendukung (super struktur) yang mendukung topik utama dalam fatwa. Seperti dibahas sebelumnya, topik utama dalam fatwa-fatwa ulama Salafi terkait dengan peran perempuan adalah “diskriminasi peran perempuan pada ranah pendidikan”. Diskriminasi perempuan yang menjadi gagasan inti tersebut didukung dengan gagasan lain yang mengarah pada diskriminasi peran perempuan. Gagasan-gagasan pendukung tersebut berupa teks-teks fatwa yang menetapkan penerapan kurikulum khusus⁷¹ dan jurusan-jurusan khusus bagi perempuan yang mengarah pada diskriminasi perempuan,⁷² teks fatwa yang mewacanakan perempuan lebih baik menikah daripada melanjutkan studi,⁷³ teks fatwa yang mencukupkan pendidikan dasar saja bagi perempuan,⁷⁴ teks fatwa larangan bersekolah ke luar negeri bagi perempuan,⁷⁵ teks fatwa larangan mengemudi bagi perempuan,⁷⁶ dan teks-teks fatwa larangan bepergian bagi perempuan kecuali dengan muhrimnya.⁷⁷ Semua gagasan pendukung tersebut merupakan pendukung gagasan inti yang mendiskriminasi peran perempuan khususnya pada ranah pendidikan. Jika diamati lebih dalam lagi gagasan-gagasan pendukung yang diskriminatif tersebut juga didukung oleh bagian terkecil berupa penggunaan unit-unit bahasa yang juga diskriminatif. Unsur teks terkecil tersebut disebut dengan struktur mikro.

⁷⁰ Eriyanto, 226.

⁷¹ ad-Darwisy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, 2003, 12:235.

⁷² Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, 2004, 24:39–40.

⁷³ Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:704. al-'Utsaimīn, *Fatāwā Nūrun Alā Ad-Darb*, 2003, 11:229.

⁷⁴ Jam'un Min al-'Ulamā', 2:704.

⁷⁵ Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, 2004, 24:39–40.

⁷⁶ 'Abdul Azīz bin Abdillāh Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, vol. 3 (Riyād: Ri'āsh Idārati al-Buhūts al-'Ilmiyyah, 1999), 351–53.

⁷⁷ al-'Utsaimīn, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2003, 12:508.

Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari susunan yang membentuk wacana yaitu kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase dan gambar. Struktur mikro menunjuk pada makna suatu wacana yang dapat digali dari aspek semantik, sintaksis, stilistika, dan retorika. Dari unsur-unsur tersebut peneliti dapat mengetahui bagaimana ulama menggunakan dan memilih satuan lingual yang digunakan dalam menggambarkan peran perempuan di ruang publik.⁷⁸ Dari struktur mikro peneliti dapat mengetahui apakah pilihan satuan lingual yang digunakan oleh ulama bersifat netral atau sebaliknya diskriminatif.

Di antara struktur mikro dalam bentuk frase dan kalimat yang digunakan oleh ulama dalam menggambarkan perempuan adalah penggambaran perempuan sebagai sosok yang “bengkok”, “kurang atau lemah akal”, “emosional”.⁷⁹ Selain itu, para ulama dalam fatwanya juga sering menyebut perempuan atau tindakannya sebagai “sumber fitnah”.⁸⁰ Kalimat “perempuan adalah sumber fitnah” ini sering diulang-ulang oleh ulama dalam argumentasi fatwa yang terkait dengan peran publik perempuan, hal itu secara tidak langsung mengisyaratkan betapa bahayanya perempuan sehingga layak dicegah untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan tertentu. Penggunaan bahasa yang mengarah pada stigma negatif yang juga sering digunakan oleh ulama adalah “perempuan sebagai penyebab kemunkaran”, “penggoda”, dan “pemancing syahwat laki-laki”.⁸¹

Kosa-kata tersebut menunjuk pada medan makna yang negatif terhadap perempuan. Pilihan kosakata dan frase tersebut secara semantik menekankan pada pemaknaan yang mengisyaratkan stigma yang buruk pada perempuan yang terdapat dalam teks fatwa ulama. Stigma buruk bagi perempuan secara tidak langsung menjadikan perempuan sebagai sosok yang peran publiknya harus dikendalikan dan diatur agar tidak menimbulkan kemunkaran. Oleh sebab itu, sebaiknya perempuan tetap tinggal di rumah. Dengan demikian, teks yang digunakan ulama dalam menggambarkan sosok perempuan dan tindakannya dalam struktur

⁷⁸ Umar Fauzan, “Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough Hingga Mills,” *Jurnal Pendidik* 6, no. 1 (2014): 11.

⁷⁹ ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, 2003, 17:9–10. Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:557.

⁸⁰ ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, 2003, 17:10–11. Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2016, 31:45–48. Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, vol. 1 (Riyād: Maktabah Dār Tabariyah, 1995), 433. Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:557. Jam'un Min al-'Ulamā', 2:567–69. al-'Utsaimīn, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2003, 11:268. Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, 1999, 4:240.

⁸¹ ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, 2003, 17:164, 204. Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2016, 31:47–48, 165–67. Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, 1999, 3:351. Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:557.

mikro ini selaras dengan alur yang terdapat dalam struktur meso dan gagasan utama dalam fatwa.

Relasi Ideologi dan Budaya di Balik Fatwa Diskriminasi Peran Perempuan pada Ranah Pendidikan

Penelusuran latar belakang ideologi merupakan kajian penting dalam analisis wacana kritis karena ideologi disebarkan dan dimapankan oleh aktor melalui wacana.⁸² Ideologi merupakan basis pengetahuan dan basis tindakan sebuah kelompok. Ketika wacana diposisikan sebagai tindakan sosial maka fondasi utama dari tindakan tersebut adalah ideologi.⁸³ Ideologi meneguhkan prinsip-prinsip dasar yang berperan penting dalam mengorganisir dan mengontrol perilaku sebuah kelompok dan anggotanya.⁸⁴ Dengan demikian, munculnya wacana diskriminasi terhadap perempuan dalam fatwa ulama memiliki landasan ideologi tertentu yang mengarahkan ulama dalam memproduksi dan mereproduksi wacana diskriminasi terhadap perempuan.

Menurut para ulama Salafi Arab Saudi perilaku keberagamaan umat Islam -termasuk perempuan- yang benar dan ideal adalah seperti perilaku keberagamaan umat Islam pada masa Nabi Muhammad.⁸⁵ Umat muslim menurut ulama Salafi harus kembali ke kemurnian ajaran Islam masa awal,⁸⁶ mengambil inspirasi dari al-Qur'an dan sunnah, mengikuti praktik *salaf al-salih*, mengarahkan ibadah hanya kepada Tuhan, dan membersihkan diri dari segala penyelewengan-penyelewengan (*khurofat*) yang telah mengakar selama ini. Ajaran ini juga menentang inovasi (*bida'ah*) atas semua tindakan atau keyakinan yang tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an, tradisi nabi, dan para sahabatnya.⁸⁷ Kelompok Salafi juga menolak penafsiran ulang atas teks-teks keagamaan islam meskipun perubahan keadaan dan zaman terjadi di sana-sini.⁸⁸ Teks agama diinterpretasikan secara literalis dalam tradisi

⁸² Teun A. Van Dijk, *Critical Discourse Analysis The Hand Book of Discourse Analysis*, Second Edition (Oxford: John Wiley & Sons, 2015), 468.

⁸³ Teun A. Van Dijk, "Ideology and Discourse Analysis," *Journal of Political Ideologies* 11, no. 2 (Juni 2006): 121, <https://doi.org/10.1080/13569310600687908>.

⁸⁴ Teun A. Van Dijk, "Multidisciplinary CDA: A plea for diversity," *Methods of critical discourse analysis* 1 (2001): 97.

⁸⁵ Harper and Subanthore, *Arab Saudi*, 60. David G. Edens, "The Anatomy of The Saudi Revolution," *International Journal of Middle East Studies* 5, no. 1 (Januari 1974): 51, <https://doi.org/10.1017/S0020743800032785>.

⁸⁶ Carol EB Choksy dan Jamsheed K. Choksy, "The Saudi connection: Wahhabism and global jihad," *World Affairs*, 2015, 25.

⁸⁷ Niblock, *Arab Saudi*, 19.

⁸⁸ Vidyaagar dan Rea, "Saudi Women Doctors," 261. Annemarie van Geel, "Separate or Together? Women-Only Public Spaces and Participation of Saudi Women in the Public Domain in Arab Saudi," *Contemporary Islam* 10, no. 3 (September 2016): 4, <https://doi.org/10.1007/s11562-015-0350-2>.

Salafi.⁸⁹ Karakteristik demikian ini merupakan cerminan dari ideologi salafisme yang membentuk identitas diri kelompok yang berbeda dengan kelompok lain. Ideologi tersebut juga meneguhkan prinsip-prinsip dasar ajaran Salafisme yang berperan penting dalam mengorganisir dan mengontrol perilaku kelompok dan anggotanya.⁹⁰

Konstruksi ideologi Salafi tersebut berpengaruh terhadap pembentukan wacana-wacana sosial keagamaan di Arab Saudi khususnya terkait dengan wacana keagamaan yang mengatur peran publik perempuan termasuk di dalamnya pendidikan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ulama dalam berbagai wacana fatwanya cenderung diskriminatif terhadap perempuan dan menempatkannya hanya pada ranah domestik. Perempuan seringkali dianggap sebagai sosok lemah, kurang akal, emosional,⁹¹ sumber fitnah,⁹² penyebab kemunkaran, penggoda, pemancing syahwat laki-laki,⁹³ dan wacana diskriminatif lainnya yang secara tidak langsung menggiring perempuan untuk tetap tinggal di rumah.

Bentuk-bentuk wacana fatwa yang mendiskriminasi peran perempuan tersebut menjadi basis perilaku dan pengetahuan ulama sehingga tercipta produk fatwa yang diskriminatif. Penulis menyebut ideologi tersebut dengan ideologi “salafisme-anti kesetaraan”. Term ini digunakan peneliti berdasarkan pada pandangan ulama Arab Saudi yang termanifestasi dalam ajaran Salafi yang anti dengan wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ideologi Salafisme-anti feminis menjadi dasar pengetahuan dan tindakan ulama dalam mempromosikan diskriminasi terhadap peran publik perempuan.

Wacana fatwa yang diskriminatif tersebut menjadi ideologis karena di dalam wacana fatwa ulama terdapat dimensi evaluatif, ada perjuangan untuk mewujudkannya, ada pembagian antara kelompok “laki-laki” dan “perempuan”, serta adanya kepentingan untuk

⁸⁹ Natana J. Delong-Bas, *Wahhabi Islam: from revival and reform to global jihad* (Oxford University Press, 2008), 4–5. Madawi Al-Rasheed, “Saudi Regime Resilience after the 2011 Arab Popular Uprisings,” *Contemporary Arab Affairs* 9, no. 1 (1 Januari 2016): 18, <https://doi.org/10.1080/17550912.2015.1118229>.

⁹⁰ Van Dijk, “Multidisciplinary CDA,” 97.

⁹¹ ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, 2003, 17:9–10. Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:557.

⁹² ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, 2003, 17:10–11. Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2016, 31:45–48. Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 1:433. Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:557. Jam'un Min al-'Ulamā', 2:567–69. al-'Utsaimīn, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2003, 11:268. Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, 1999, 4:240.

⁹³ ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*, 2003, 17:164, 204. Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2016, 31:47–48, 165–67. Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, 1999, 3:351. Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:557.

mengarahkan perempuan masuk ke ranah domestik.⁹⁴ Ideologi Salafisme-anti feminis mengarahkan ulama baik individu ataupun kelompok untuk menyikapi sebuah isu terkait dengan peran publik perempuan sesuai dengan aturan, nilai, dan pengetahuan yang dijadikan dasar oleh ideologi tersebut.⁹⁵ Oleh karena itu, ideologi ini mempengaruhi dan menggiring cara pandang para ulama Salafi terkait dengan peran publik perempuan.

Ideologi Salafi anti-kesetaraan juga mewarnai dan mempengaruhi tindakan ulama dalam merumuskan teks-teks fatwa sehingga sesuai dengan tujuan dan kepentingan kelompok Salafi yang mengarahkan peran perempuan pada ranah domestik.⁹⁶ Dalam konteks ini, wacana fatwa yang dirumuskan oleh ulama didasarkan pada wacana yang terdapat pada produk-produk tafsir ulama yang cenderung diskriminatif.

Ideologi tersebut juga melahirkan wacana tafsir agama yang tekstual dan rigid. Dalam fatwa-fatwa yang mendiskriminasi perempuan, ulama Salafi mendasarkan argumen fatwanya pada penafsiran surat al-Ahzab: 23 yang artinya: *dan tetaplah (perempuan) tinggal di rumah*. Ayat tersebut ditafsirkan oleh ulama Salafi sebagai perintah tetap berada di rumah bagi perempuan dan berlaku umum bagi semua perempuan muslim di dunia ini.⁹⁷ Begitu juga dalam menafsirkan surat an-Nisa': 34, ulama dengan tegas menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan keunggulan laten bagi laki-laki atas perempuan. Perempuan akan selalu berada di bawah kendali laki-laki. Pandangan tersebut kemudian diberlakukan secara general dan dijadikan landasan hukum penetapan wali bagi perempuan Arab Saudi.⁹⁸ Berdasarkan ayat tersebut ulama juga berpendapat bahwa laki-laki diposisikan sebagai sosok yang lebih superior sedangkan perempuan berada dalam posisi yang lebih inferior. Ayat tersebut lantas digunakan sebagai salah satu dalil untuk melegitimasi diskriminasi terhadap perempuan.

Ideologi Salafi-anti kesetaraan juga mempengaruhi dan mengarahkan ulama dalam memilih hadis-hadis yang cenderung memandang perempuan secara diskriminatif. Hadis-hadis tersebut kemudian dijadikan justifikasi untuk mendukung argumen wacana fatwa yang menyudutkan, membatasi, dan meminggirkan peran publik perempuan. Hadis-hadis yang sering dikutip untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan antara lain seperti hadis

⁹⁴ Teun A. Van Dijk, "Ideology and discourse: A multidisciplinary introduction," *Pompeu Fabra University, Barcelona*, 2000, 20.

⁹⁵ Teun Van Dijk, "Discourse-Cognition-Society. Current state and prospects of the socio-cognitive approach to discourse," *Contemporary studies in critical discourse analysis*, 2014, 12.

⁹⁶ Van Dijk, "Ideology and discourse," 43. Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis. Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 89.

⁹⁷ Jam'un Min al-'Ulamā', *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*, 1995, 2:564. Bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, 1999, 3:308–10.

⁹⁸ Quamar, "Sociology of the Veil in Saudi Arabia," 6.

yang menjelaskan “jika perempuan keluar ia akan dihiasi oleh setan”, hadis yang⁹⁹ menerangkan betapa berbahayanya perempuan karena merupakan sumber fitnah bagi laki-laki,¹⁰⁰ hadis yang memerintahkan untuk takut dan waspada kepada perempuan karena perempuan adalah awal fitnah bagi Bani Isra’il,¹⁰¹ hadis yang menjelaskan bahwa perempuan adalah sosok yang kurang akal nya dan agamanya,¹⁰² hadis yang menjelaskan berdesakan dengan babi yang berlumpur lebih baik bagi laki-laki daripada bahunya berdesakan dengan bahu perempuan yang bukan muhrim,¹⁰³ hadis yang menyamakan perempuan sama dengan anjing hitam dan keledai dalam hal membatalkan shalatnya laki-laki ketika mereka lewat di depannya,¹⁰⁴ hadis yang melarang perempuan bepergian kecuali dengan muhrimnya,¹⁰⁵ dan hadis yang menyuruh perempuan untuk segera menikah.¹⁰⁶

Ideologi Salafisme-anti feminis juga mempengaruhi tindakan dan perilaku ulama yang cenderung anti-Barat. Ulama melalui fatwanya seringkali mengkampanyekan anti terhadap segala macam budaya yang berasal dari Barat termasuk tentang wacana kesetaraan gender.¹⁰⁷ Ulama secara umum khawatir akan pengaruh nilai-nilai budaya Barat yang akan mendegradasi dan merusak moral masyarakat Arab Saudi.¹⁰⁸ Dalam konteks ini, ulama juga menganggap wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan produk Barat bertentangan dengan syariah islam (*God’s Law*) dan hukum alam (*the law of nature*).¹⁰⁹ Banyak di antara fatwa-fatwa ulama yang melarang umat islam untuk bepergian, bersekolah, dan bekerja di negara-negara kafir khususnya negara-negara barat.¹¹⁰ Dalam hal ini ulama mengkhawatirkan terjadinya penjajahan budaya Barat khususnya bagi perempuan. Ulama

⁹⁹ ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā’imah li al-Buhūts al-’Ilmiyyah wa al-Iftā’*, 2003, 17:163–64.

¹⁰⁰ Bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, 1999, 3:351–53. Bin Bāz, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2016, 31:124.

¹⁰¹ Jam’un Min al-’Ulamā’, *Fatāwā al-Mar’ah al-Muslimah*, 1995, 2:567.

¹⁰² Jam’un Min al-’Ulamā’, 2:554.

¹⁰³ Jam’un Min al-’Ulamā’, 2:569.

¹⁰⁴ El Fadl, “Atas Nama Tuhan,” 331.

¹⁰⁵ al-’Utsaimīn, *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*, 2003, 12:508.

¹⁰⁶ Jam’un Min al-’Ulamā’, *Fatāwā al-Mar’ah al-Muslimah*, 1995, 2:704.

¹⁰⁷ Mansoor Moaddel, “The Saudi public speaks: Religion, gender, and politics,” dalam *Values and Perceptions of the Islamic and Middle Eastern Publics* (Springer, 2007), 79.

¹⁰⁸ Smeeta Mishra, “‘Liberation’ vs. ‘Purity’: Representations of Saudi Women in the American Press and American Women in the Saudi Press,” *Howard Journal of Communications* 18, no. 3 (27 Juli 2007): 261, <https://doi.org/10.1080/10646170701490849>.

¹⁰⁹ Doumato, “Women and Work in Saudi Arabia,” 579.

¹¹⁰ ad-Darwīsy, *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā’imah li al-Buhūts al-’Ilmiyyah wa al-Iftā’*, 2003, 12:126.

tidak percaya bahwa perempuan akan mampu membentengi dirinya dari ide-ide yang berasal dari Barat.¹¹¹

Selain ideologi budaya dan adat istiadat masyarakat Arab Saudi juga berpengaruh dalam membentuk wacana fatwa khususnya fatwa terkait peran publik perempuan. Senada dengan pernyataan tersebut, Rasheed menggaris bawahi bahwa faktor sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap pemosisian peran perempuan di masyarakat.¹¹² Budaya merupakan cerminan seperangkat kepercayaan dan praktik pada komunitas tertentu. Dalam konteks ini, budaya dan adat istiadat kesukuan masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam juga berkontribusi pada orientasi yang konservatif terhadap peran perempuan dalam masyarakat islam.¹¹³

Dengan kata lain, tradisi kesukuan masyarakat Arab yang memandang dan memperlakukan perempuan secara diskriminatif sedikit banyak masih tetap berpengaruh sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat Arab Islam. Budaya tersebut tetap hidup dan melebur menjadi satu dengan budaya lainnya.¹¹⁴ Meskipun tradisi islam berusaha untuk membangun pandangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun kuatnya budaya kesukuan yang cenderung patriarkhi pada masyarakat Arab masih tetap mewarnai produksi wacana yang memarginalkan perempuan. Budaya patriarki memberikan otoritas dan dominasi kepada laki-laki dalam kehidupan berumahtangga dan bermasyarakat. Laki-laki merupakan pusat dari segala bidang kehidupan sementara perempuan dalam posisi yang marjinal.¹¹⁵ Lebih lanjut lagi Effendi berpendapat bahwa karena sebagian besar budaya masyarakat Arab adalah patriarkal, maka masyarakat menempatkan perempuan dalam peran pasif di tempat kerja dan dalam keluarga. Salah satu wujud budaya patriarki yang masih terus dilanggengkan adalah dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan khususnya kehidupan publik. Pemimpin negara dan dewan ulama selalu dijabat oleh laki-laki.

Kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam produksi tafsir juga mempengaruhi wacana-wacana lainnya termasuk wacana dalam bentuk fatwa yang ditetapkan oleh para ulama Arab Saudi. Hal ini karena argumentasi-argumentasi yang digunakan oleh ulama dalam berfatwa bersumber dari ijtihad ulama yang disarikan dari al-Qur'an, hadis, dan hasil

¹¹¹ Nagat El-Sanabary, "Female Education in Saudi Arabia and the Reproduction of Gender Division," *Gender and Education* 6, no. 2 (Januari 1994): 142, <https://doi.org/10.1080/0954025940060204>.

¹¹² Hodges, "Cracking the Walls of Leadership," 6.

¹¹³ Al-Ahmadi, "Challenges facing women leaders in Saudi Arabia," 3.

¹¹⁴ Madawi Al-Rasheed, *A most masculine state: Gender, politics and religion in Saudi Arabia*, 43 (Cambridge University Press, 2013), 9.

¹¹⁵ M. Nurdin Zuhdi, "Perempuan Dalam Revivalisme (Gerakan Revivalisme Islam dan Politik Anti Feminisme di Indonesia)," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 9, no. 2 (2010): 248–49.

ijtihad dari para ulama lainnya.¹¹⁶ Oleh karena itu tidak mengherankan jika corak wacana fatwa yang diproduksi oleh ulama juga tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki.

KESIMPULAN

Meskipun dalam beberapa fatwanya, para ulama Salafi menggambarkan perempuan sebagai saudara kandung (*syaqāiq*) laki-laki dan sebagian perannya setara dengan peran laki-laki. Namun demikian, dalam fatwa-fatwa lainnya para ulama sering kali menggambarkan sosok perempuan dan perannya secara diskriminatif. Para ulama Salafi Arab Saudi dalam fatwa-fatwanya mengarahkan peran perempuan lebih pada ranah domestik. Dalam ranah pendidikan, para ulama menfatwakan kurikulum dan jurusan-jurusan tertentu bagi perempuan yang mengarah pada diskriminasi, ulama juga mendorong perempuan untuk menikah daripada melanjutkan studi, dan perempuan difatwakan cukup menempuh pendidikan dasar. Diskriminasi peran perempuan dalam fatwa-fatwa ulama tersebut tidak lepas dari konstruksi ideologi Ulama Salafi yang anti dengan kesetaraan. Ideologi tersebut berpengaruh terhadap pembentukan wacana diskriminatif terhadap pendidikan perempuan. Ideologi anti kesetaraan tersebut juga menjadi dasar pengetahuan dan tindakan ulama dalam mempromosikan diskriminasi perempuan pada ranah pendidikan. Selain itu, kuatnya budaya patriarki pada masyarakat Arab juga mewarnai produksi wacana yang cenderung mendiskriminasi peran perempuan. Para ulama Arab Saudi dapat mengontrol peran perempuan pada ranah publik karena memiliki kewenangan dan akses yang luas di Arab Saudi. Dalam konteks ini, pemerintah Arab Saudi memberikan wewenang kepada ulama untuk mengatur perilaku masyarakat termasuk mengatur peran perempuan pada ranah pendidikan khususnya pada era sebelum Muhammad bin Salman berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmadi, Hanan. "Challenges facing women leaders in Saudi Arabia." *Human Resource Development International* 14, no. 2 (1 April 2011): 149–66. <https://doi.org/10.1080/13678868.2011.558311>.
- Al-Atawneh, Muhammad. "Is Saudi Arabia a Theocracy? Religion and Governance in Contemporary Saudi Arabia." *Middle Eastern Studies* 45, no. 5 (1 September 2009): 721–37. <https://doi.org/10.1080/00263200802586105>.

¹¹⁶ Ali A. Al-Kandari dan Ali Dashti, "Fatwa and the Internet: A Study of the Influence of Muslim Religious Scholars on Internet Diffusion in Saudi Arabia," *Prometheus* 32, no. 2 (3 April 2014): 130, <https://doi.org/10.1080/08109028.2014.998929>.

- Al-Kandari, Ali A., dan Ali Dashti. "Fatwa and the Internet: A Study of the Influence of Muslim Religious Scholars on Internet Diffusion in Saudi Arabia." *Prometheus* 32, no. 2 (3 April 2014): 127–44. <https://doi.org/10.1080/08109028.2014.998929>.
- Al-Kayed, Lama. "Leadership challenges for women managers in public universities in Saudi Arabia." *Global Journal of Human-Social Science Research* 15, no. 4 (2015).
- AlMunajjed, Mona. *Women in Saudi Arabia Today*. New York: St. Martin's Press, 1997.
- Al-Rasheed, Madawi. *A most masculine state: Gender, politics and religion in Saudi Arabia*. 43. Cambridge University Press, 2013.
- . "Saudi Regime Resilience after the 2011 Arab Popular Uprisings." *Contemporary Arab Affairs* 9, no. 1 (1 Januari 2016): 13–26. <https://doi.org/10.1080/17550912.2015.1118229>.
- Aquil, Rajaa. "Change and Muslim women." *International journal of humanities and social science* 1, no. 21 (2011): 21–30.
- Badara, Aris. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Prenada Media, 2014.
- Baki, Roula. "Gender-Segregated Education in Saudi Arabia: Its Impact on Social Norms and the Saudi Labor Market." *Education Policy Analysis Archives* 12, no. 28 (17 Juni 2004). <https://eric.ed.gov/?id=EJ852310>.
- Bin Bāz, 'Abdul Azīz bin Abdillāh. *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*. Vol. 27. Riyād: al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta', 2013.
- . *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*. Vol. 30. 1. Riyad: al-Ri'asah al-'Ammah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta', 2016.
- . *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*. Vol. 31. 2. Riyād: al-Ri'āsah al-'Āmmah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta', 2016.
- . *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Vol. 4. Riyād: Ri'āsah Idārati al-Buhūts al-'Ilmiyyah, 1999.
- . *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Vol. 3. Riyād: Ri'āsah Idārati al-Buhūts al-'Ilmiyyah, 1999.
- . *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Vol. 24. Riyād: Ri'āsah Idārati al-Buhūts al-'Ilmiyyah, 2004.
- Bligh, Alexander. "The Saudi Religious Elite (ULAMA) as Participant in The Political System of The Kingdom." *International Journal of Middle East Studies* 17, no. 1 (Februari 1985): 37–50. <https://doi.org/10.1017/S0020743800028750>.
- Choksy, Carol EB, dan Jamsheed K. Choksy. "The Saudi connection: Wahhabism and global jihad." *World Affairs*, 2015, 23–34.

- Darwīsy, Ahmad 'Abd al-Razzāq ad-. *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*. 5 ed. Vol. 17. Riyād: Dār al-Mu'ayyad, 2003.
- . *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah li al-Buhūts al-'Ilmiyyah wa al-Iftā'*. Vol. 12. Riyād: Dār al-Mu'ayyad, 2003.
- Delong-Bas, Natana J. *Wahhabi Islam: from revival and reform to global jihad*. Oxford University Press, 2008.
- Doumato, Eleanor Abdella. "Women and Work in Saudi Arabia: How Flexible Are Islamic Margins?" *Middle East Journal* 53, no. 4 (1999): 568–83.
- Edens, David G. "The Anatomy of The Saudi Revolution." *International Journal of Middle East Studies* 5, no. 1 (Januari 1974): 50–64. <https://doi.org/10.1017/S0020743800032785>.
- El Fadl, Khaled M. Abou. "Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj." R. Cecep Lukman Yasin. *Jakarta: Serambi Ilmu Semesta*, 2004.
- El-Sanabary, Nagat. "Female Education in Saudi Arabia and the Reproduction of Gender Division." *Gender and Education* 6, no. 2 (Januari 1994): 141–50. <https://doi.org/10.1080/0954025940060204>.
- Eriyanto. *Analisis wacana: pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta, 2001.
- Fairclough, Norman. "Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities." *Discourse & society* 4, no. 2 (1993): 133–68.
- Fauzan, Umar. "Analisis Wacana Kritis dari Model Faiclough Hingga Mills." *Jurnal Pendidik* 6, no. 1 (2014).
- Freer, Courtney. "The Symbiosis of Sectarianism, Authoritarianism, and Rentierism in the Saudi State." *Studies in Ethnicity and Nationalism* 19, no. 1 (April 2019): 88–108. <https://doi.org/10.1111/sena.12287>.
- Geel, Annemarie van. "Separate or Together? Women-Only Public Spaces and Participation of Saudi Women in the Public Domain in Saudi Arabia." *Contemporary Islam* 10, no. 3 (September 2016): 357–78. <https://doi.org/10.1007/s11562-015-0350-2>.
- Hamdan, Amani. "Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements." *International Education Journal* 6, no. 1 (Maret 2005): 42–64.
- Harper, Robert Alexander, dan Aswin Subanthore. *Saudi Arabia*. 2nd ed. Modern World Nations. New York: Chelsea House, 2007.
- Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis. Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hodges, Julie. "Cracking the Walls of Leadership: Women in Saudi Arabia." *Gender in Management: An International Journal* 32, no. 1 (6 Maret 2017): 34–46. <https://doi.org/10.1108/GM-11-2015-0106>.

- Jam'un Min al-'Ulamā'. *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*. Vol. 2. Riyad: Maktabah Dār Tayariyah, 1995.
- . *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah*. Vol. 1. Riyād: Maktabah Dār Tabariyah, 1995.
- Jawad, Haifaa. *The rights of women in Islam: An authentic approach*. Springer, 1998.
- Kanie, Mariwan. “Young Saudi Women Novelists: Protesting Clericalism, Religious Fanaticism and Patriarchal Gender Order.” *Journal of Arabian Studies* 7, no. 2 (3 Juli 2017): 283–99. <https://doi.org/10.1080/21534764.2017.1499227>.
- Kaptein, Nico J. G. “The Voice of the 'Ulamā': Fatwas and Religious Authority in Indonesia.” *Archives de sciences sociales des religions* 115–130 (2004). <https://doi.org/10.4000/assr.1038>.
- Kattan, Manal Matouq, Carmen De Pablos Heredero, Jose Luis Montes Botella, dan Vasilica Maria Margalina. “Factors of Successful Women Leadership in Saudi Arabia.” *Asian Social Science* 12, no. 5 (19 April 2016): 94. <https://doi.org/10.5539/ass.v12n5p94>.
- Kraidy, Marwan. “Reality Television, Gender, and Authenticity in Saudi Arabia.” *Journal of Communication* 59, no. 2 (Juni 2009): 345–66. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2009.01419.x>.
- Lazar, Michelle M., ed. *Feminist Critical Discourse Analysis*. London: Palgrave Macmillan UK, 2005. <https://doi.org/10.1057/9780230599901>.
- Le Renard, Amélie. “‘Only for Women:’ Women, the State, and Reform in Saudi Arabia.” *The Middle East Journal* 62, no. 4 (1 Oktober 2008): 610–29. <https://doi.org/10.3751/62.4.13>.
- Manchin, David, dan Andrea Mayr. *How to do critical discourse analysis*. New York: Sage Publications, 2012.
- McLoughlin, Linda. *A Critical Discourse Analysis of South Asian Women's Magazines: Undercover Beauty*. Palgrave Studies in Language, Gender and Sexuality. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017.
- Mishra, Smeeta. “‘Liberation’ vs. ‘Purity’: Representations of Saudi Women in the American Press and American Women in the Saudi Press.” *Howard Journal of Communications* 18, no. 3 (27 Juli 2007): 259–76. <https://doi.org/10.1080/10646170701490849>.
- Moaddel, Mansoor. “The Saudi public speaks: Religion, gender, and politics.” Dalam *Values and Perceptions of the Islamic and Middle Eastern Publics*, 209–46. Springer, 2007.
- Niblock, Tim. *Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival*. 1 ed. Routledge, 2004. <https://doi.org/10.4324/9780203572351>.
- Otterbeck, Jonas. “Wahhabi ideology of social control versus a new publicness in Saudi Arabia.” *Contemporary Islam* 6, no. 3 (2012): 341–53.

- Pharaon, Nora Alarifi. "Saudi women and the Muslim state in the twenty-first century." *Sex roles* 51, no. 5–6 (2004): 349–66.
- Quamar, Md. Muddassir. "Sociology of the Veil in Saudi Arabia: Dress Code, Individual Choices, and Questions on Women's Empowerment: Sociology of the Veil in Saudi Arabia." *Digest of Middle East Studies* 25, no. 2 (September 2016): 315–37. <https://doi.org/10.1111/dome.12085>.
- Radwan, Ghada N., Ebenzer Israel, Maged El-Setouhy, Fatma Abdel-Aziz, Nabil Mikhaïl, dan M. K. Mohamed. "Impact of religious rulings (Fatwa) on smoking." *Journal-Egyptian Society of Parasitology* 33, no. 3; SUPP (2003): 1087–1102.
- Sidani, Yusuf. "Women, work, and Islam in Arab societies." *Women in Management Review* 20, no. 7 (2005): 498–512.
- Sueyoshi, Shuji, dan Ryutaro Ohtsuka. "Significant effects of Fatwa-based perception on contraceptive practice among Muslim women in south Jordan under the early stage of fertility transition." *Biodemography and social biology* 56, no. 1 (2010): 67–79.
- Talhamy, Yvette. "The Fatwas and the Nusayri/Alawis of Syria." *Middle Eastern Studies* 46, no. 2 (1 Maret 2010): 175–94. <https://doi.org/10.1080/00263200902940251>.
- Thompson, Mark C. "Saudi Women Leaders: Challenges and Opportunities." *Journal of Arabian Studies* 5, no. 1 (2 Januari 2015): 15–36. <https://doi.org/10.1080/21534764.2015.1050880>.
- 'Utsaimīn, Muhammad al-Shālih al-. *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*. Vol. 11. Mamlakah 'Arabiyyah as-Su'udiyah: Mu'assasatu al-Syaikh Muhammad bin Shālih al-'Utsaimīn, 2003.
- . *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*. Vol. 12. Mamlakah 'Arabiyyah as-Su'udiyah: Mu'assasatu al-Syaikh Muhammad bin Shālih al-'Utsaimīn, 2003.
- . *Fatāwā Nūrun alā ad-Darb*. Vol. 9. Mamlakah 'Arabiyyah as-Su'udiyah: Mu'assasatu al-Syaikh Muhammad bin Shālih al-'Utsaimīn, 2003.
- Van Dijk, Teun. "Discourse-Cognition-Society. Current state and prospects of the socio-cognitive approach to discourse." *Contemporary studies in critical discourse analysis*, 2014, 121–46.
- Van Dijk, Teun A. "Aims of critical discourse analysis." *Japanese discourse* 1, no. 1 (1995): 17–28.
- . *Critical Discourse Analysis The Hand Book of Discourse Analysis*. Second Edition. Oxford: John Wiley & Sons, 2015.
- . "Discourse and manipulation." *Discourse & Society* 17, no. 3 (2006): 359–83.
- . "Ideology and discourse: A multidisciplinary introduction." *Pompeu Fabra University, Barcelona*, 2000, 1025–34.

- . “Ideology and Discourse Analysis.” *Journal of Political Ideologies* 11, no. 2 (Juni 2006): 115–40. <https://doi.org/10.1080/13569310600687908>.
- . “Multidisciplinary CDA: A plea for diversity.” *Methods of critical discourse analysis* 1 (2001): 95–120.
- . “Principles of Critical Discourse Analysis.” *Discourse & Society* 4, no. 2 (April 1993): 249–83. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002006>.
- Vidyasagar, Girija, dan David M. Rea. “Saudi Women Doctors: Gender and Careers within Wahhabic Islam and a ‘Westernised’ Work Culture.” *Women’s Studies International Forum* 27, no. 3 (Agustus 2004): 261–80. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2004.06.008>.
- Wodak, Ruth, Paul A. Chilton, dan Wodak-Chilton, ed. *A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology, and Interdisciplinary*. Discourse Approaches to Politics, Society, and Culture 13. Amsterdam: Benjamins, 2005.
- Yamani, May. “From Fragility to Stability: A Survival Strategy for the Saudi Monarchy.” *Contemporary Arab Affairs* 2, no. 1 (1 Januari 2009): 90–105. <https://doi.org/10.1080/17550910802576114>.
- Zuhdi, M. Nurdin. “Perempuan Dalam Revivalisme (Gerakan Revivalisme Islam dan Politik Anti Feminisme di Indonesia).” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 9, no. 2 (2010): 237–57.